



Kontribusi Faktor Budaya Dan Agama Terhadap Upaya Moderasi Beragama Di Maluku: Kajian Historisitas-Deskriptif

Bernard A. Rahawarin ^{a,1}

^a STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon, Maluku, Indonesia

^{1*} berry02@hotmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: 14 Juni 2024

Revised: 1 September 2024

Accepted: 1 November 2024

Keywords:

Religious Moderation, Culture, Religion, Affirmation, Negation.

Kata-kata Kunci:

Moderasi Beragama, Budaya, Agama, Afirmasi, Negasi

DOI:

ABSTRACT

This article aims to describe the historical experience of cultural and religious affirmation and negation in the context of efforts to promote religious moderation in Maluku. Historical data on cultural and religious diversity were gathered using a literature study method. The effort to build national unity through interreligious tolerance has long been pursued and is now known as religious moderation. The promotion of religious moderation in Maluku is constantly influenced by the cultural and religious backgrounds of community members. Through an analysis of the collected historical facts, this article successfully identifies how culture and religion contribute to the efforts to promote religious moderation in Maluku. These contributions are reflected in the forms of affirmation and negation.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pengalaman sejarah tentang kontribusi budaya dan agama dalam konteks upaya membangun moderasi beragama di Maluku. Data-data historis tentang keberagaman budaya dan agama dihimpun dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Usaha membangun kesatuan hidup berbangsa dan bernegara lewat toleransi antar umat beragama merupakan upaya yang telah dibangun sejak lama. Kini upaya ini dikenal dengan nama

moderasi beragama. Upaya menggalakkan moderasi beragama di Maluku senantiasa dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan agama yang dimiliki anggota masyarakat. Lewat analisis yang dilakukan atas fakta historis yang terhimpun, artikel ini berhasil mengidentifikasi cara budaya dan agama memberikan kontribusi terhadap upaya menggalakkan moderasi beragama di Maluku. Kontribusi itu terungkap dalam bentuk afirmasi dan negasi.

Copyright © 2025 by LOGOS STPAK Ambon



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Sejauh ini masyarakat Maluku telah banyak mengekspresikan kearifan budaya lokal dan peranan agama sebagai pijakan dalam menjaga persatuan dan keutuhan hidup bermasyarakat. Kearifan budaya lokal dan agama dipegang sebagai modal sosial yang sangat berharga untuk membangun cara pandang, sikap, dan perilaku dalam dalam rangka terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan beragama di Maluku. Moderasi beragama adalah sebuah istilah yang populer akhir-akhir ini pada dasarnya memuat cita-cita yang telah hidup sejak lama, yakni memelihara persatuan dan persaudaraan yang merupakan komitmen kebangsaan Indonesia.

Apa yang disebut dengan moderasi beragama lahir dari kebutuhan sebuah kebersamaan dan saling menghormati dalam iklim kehidupan Indonesia yang plural ini. Kebersamaan dan saling menghormati itu sesungguhnya telah memiliki dasar pada nilai-nilai budaya dan agama yang telah tertanam dalam kehidupan manusia Indonesia. Pemerintah Indonesia memandang perlu mengimplementasikan moderasi beragama di Bumi Pertiwi, sehingga saat ini moderasi beragama sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.¹

Untuk menjelaskan konsep Pemerintah Indonesia ini, uraian ini akan merujuk langsung pada buku “Moderasi Beragama” yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI. Dalam buku tersebut, istilah moderasi beragama dipahami sebagai

Sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.²

Prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah keadilan dan keseimbangan. Konsep keadilan umumnya dipahami sebagai memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya. Dengan demikian tidak ada tempat bagi sikap berat sebelah, berpihak, dan kesewenang-wenangan. Yang ada hanyalah berpihak pada kebenaran. Sementara prinsip keseimbangan menunjuk pada cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan juga tidak kurang, tidak konservatif dan juga tidak

¹ Tim Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, Edition Pertama, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), vi.

² Tim Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 8.

liberal. Prinsip keadilan dan keseimbangan terlebur dalam bentuk keharmonisan hidup di tengah iklim dunia yang plural. Hal mendasar yang ditemukan dalam semua agama adalah sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Inilah yang kita kenal dengan sikap iman. Semua agama mengklaim bahwa sesungguhnya mereka mengajarkan tentang kebaikan dan bukan kejahatan. Dalam kaitan dengan moderasi, semua agama menghendaki suatu kehidupan yang adil, damai, dan harmonis.³

Terdapat berbagai indikator yang dapat digunakan dalam kehidupan bersama kita. Namun di sini secara khusus hanya dikemukakan empat indikator sebagaimana dikemukakan oleh pihak Kementerian Agama RI. Keempat indikator dimaksud adalah: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. **Komitmen kebangsaan** menunjuk pada sejauh mana penghayatan iman dan praktek beragama berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan, terutama terkait dengan penerimaan Pancasila dan UUD 1945. **Sikap toleransi** senantiasa memberi ruang luas bagi orang lain untuk beriman, mengekspresikan iman, dan menyampaikan pendapatnya, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Di sini diandaikan adanya sikap hormat kepada pihak lain. **Anti kekerasan**, dalam konteks ini, dipahami sebagai penolakan terhadap suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik melalui cara-cara kekerasan/ekstrim atas nama agama. Kekerasan dimaksud dapat berupa kekerasan verbal, fisik maupun pikiran.⁴ Fungsi yang utuh dari moderasi beragama adalah menengahi kedua ekstrim ini. Penekanan terhadap praktek beragama jalan tengah benar-benar dipeluk dalam dalam menginternalisasi nilai-nilai kehidupan, baik dalam lingkup kehidupan beragama maupun dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Upaya menggalang persatuan di Maluku melalui moderasi beragama dilaksanakan di tengah fakta masyarakat yang plural, baik di bidang agama maupun di bidang budaya. Kedua faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain dalam cara merasa dan bertindak masyarakat Maluku. Maka upaya menggalakkan moderasi beragama di Maluku turut dipengaruhi baik oleh latar belakang agama maupun oleh latar belakang budaya. Pengalaman historis mengungkapkan bahwa dalam menggalakkan moderasi beragama di Maluku, pengaruh budaya dan agama dapat bersifat mendukung maupun menghambat.

Jika demikian maka muncul pertanyaan: “Bagaimana budaya dan agama berkontribusi bagi sejarah pergumulan masyarakat Maluku dalam membangun persatuan umat beragama?” Bertolak dari pertanyaan ini maka uraian ini bertujuan mendeskripsikan pengalaman sejarah tentang afirmasi dan negasi budaya dan agama dalam konteks upaya membangun moderasi beragama di Maluku.

³ Bdk. Tim Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 23-41.

⁴ Bdk. Tim Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 42-47.

⁵ Tim Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, 47-52.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu menghimpun dan menganalisis hasil penelitian atau pemikiran dari berbagai pihak yang telah dipublikasi dan tentunya yang berhubungan dengan judul tulisan ini. Hasil pekerjaan dipresentasikan dengan menggunakan metode historis-deskriptif.

PEMBAHASAN

Fakta Pluralitas Budaya dan Agama di Maluku

Pada dasarnya kebudayaan dan agama merupakan dua faktor yang berbeda. Namun pada kenyataannya, sejak dahulu, budaya dan agama punya hubungan timbal balik. Di satu pihak agama mengadopsi unsur-unsur budaya (misalnya ritus), sementara di pihak lain kebudayaan pun mengadopsi unsur-unsur agama (misalnya hukum). Demikianlah pengaruh timbal-balik ini berlangsung hingga sekarang. Pada hubungan inilah berdiri apa yang disebut kontekstualisasi, inkulturasi, akulturasi, dan seterusnya.⁶ Atas pertimbangan inilah maka dalam konteks pembahasan tentang moderasi beragama ini, faktor budaya dan agama diangkat secara bersama-sama.

Fakta Historis Pluralitas Budaya

Bentangan kebudayaan Maluku dalam tantangan asimilasi kebudayaan dapat dibagi menjadi tiga gelombang, yakni: (1) Budaya Maluku dan persentuhan awalnya dengan kebudayaan dunia; (2) Kebudayaan Maluku dalam pusaran kebudayaan nasional; dan (3) Kebudayaan Maluku dalam geliat hibridisasi budaya global.⁷

Gelombang pertama: Budaya Maluku dan persentuhan awalnya dengan kebudayaan dunia. Secara historis-antropologis, tercatat bahwa kebudayaan dan peradaban di Maluku telah terbentuk dan terbangun dari suatu integrasi dalam sebuah sistem global sejak ribuan tahun lalu. Dari proses inilah secara bertahap telah terbentuk lapisan-lapisan kebudayaan yang sangat berragam, yang jejaknya dapat kita temui hingga saat ini. Berikut adalah sejumlah contoh yang berbicara tentang jejak-jejak dimaksud.⁸

Adanya kedekatan tradisi pengelolaan kelestarian pulau-pulau kecil melalui sistem “dusun” dengan gaya pengelolaan hutan pulau-pulau kecil masyarakat Melanesia di Kawasan Pasifik. Hubungan rumpun masyarakat Melanesia juga tampak dalam struktur “bahasa-bahasa tanah” di wilayah Maluku sebelum lebih jauh mengalami perjumpaan dengan budaya-budaya lain di Nusantara maupun di luar Nusantara.

⁶ Bdk. Bernard A. Rahawarin, F. Selatang, & Ignasius S.S. Refo, “Kontekstualisasi Teologis Sakramen Tobat dalam Tradisi Sob Lor pada Masyarakat Kei Provinsi Maluku,” *SMART. Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 7, no. 1, (2021): 115-127, <https://doi.org/https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1246>.

⁷ Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, *Menelusuri Identitas Kemalukuan*, Edisi Ketiga, eds., Tim Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku dan Rosa Delima, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019), v-xii.

⁸ Bdk. Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, *Menelusuri Identitas Kemalukuan*, v-vii.

Keragaman alat musik (seruling, tifa, rebana, ukulele, gitar, hawaian, dan lain-lain) dapat tampil sebagai bukti jejak perjumpaan dan integrasi Maluku dengan budaya-budaya bangsa lain yang lebih bervariasi lagi dan bahkan letak geografisnya sangat jauh dari wilayah Maluku, seperti: Arab, Cina, Eropa, India, Persia, dan lainnya.

Faktor asimilasi ras yang cukup luas juga merupakan contoh jejak-jejak persentuhan dengan budaya lain. Keragaman marga-marga yang ada di Maluku dengan cukup jelas menunjuk pada telah terjadinya percampuran ras antara masyarakat pribumi Maluku dengan berbagai bangsa yang pernah bersentuhan dengan sejarah perkembangan budaya dan peradaban yang panjang. Selain itu, fakta historis bahwa pernah terjadinya pertemuan dengan bangsa lain adalah perdagangan rempah-rempah yang pernah terjadi di Maluku dengan bangsa-bangsa Eropa.

Gelombang kedua: Kebudayaan Maluku dalam pusaran kebudayaan nasional. Maluku adalah salah satu dari delapan provinsi yang pada awalnya membentuk negara baru yang disebut Indonesia. Dengan posisi ini “Maluku terseret masuk dalam kebudayaan yang dikonstruksi secara politis otoritatif dari Jakarta.”⁹ Dalam konteks mempertahankan kemerdekaan, sebuah budaya Indonesia perlu dibangun dengan konsekuensi terjadinya penyeragaman budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyeragaman budaya tersebut akhirnya menempatkan suatu budaya Jawa menjadi budaya yang dominan. Contoh konkritnya adalah pembentukan pemerintahan desa. Pola pemerintahan masyarakat adat desa-desa di Maluku yang berbasis klan dan pola relasi kekerabatan terpaksa digantikan dengan sistem pemerintahan desa yang baru (ala Jawa) yang jauh berbeda.

Berhadapan dengan budaya etnis lain di Indonesi, Maluku ldituntut untuk menjadi lebih terbuka. Contohnya program transmigrasi yang telah dimulai sejak awal tahun 70-an telah mengkonstruksikan Maluku sebagai daerah yang berubah dari pengelolaan hutan berbasis budaya dusun menjadi budaya pertanian dan perkebunan. Selanjutnya perlu dicatat juga bahwa dengan lahirnya otonomisasi pasca Orde Baru, pendekatan otoritatif terhadap penerapan monokulturisme mendapat reaksi balik di mana-mana, termasuk di Maluku, melalui fanatisme provinsi yang agak bercampur dengan sentimen etnis. *Beta Maluku* dan *Satu Darah* adalah contoh terminologi yang mengekspresikan hal tersebut dan yang kini sering ditemui dalam komunikasi masyarakat Maluku.

Gelombang ketiga: Kebudayaan Maluku dalam geliat hibridisasi budaya global. Trend kehidupan yang mengglobal membuahakan kenyataan di mana tampak faktor batas-batas spasial semakin absurd di hadapan ruang-ruang virtual yang disodorkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam iklim seperti ini: “Budaya Maluku dihadapkan pada tantangan tercabut dari berbagai aspek konvensionalnya. Budaya Maluku berada dalam interaksi hiper-kultural dengan berbagai produk kebudayaan

⁹ Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, *Menelusuri Identitas Kemalukuan*, vii.

lintas territorial. Kemudian budaya Maluku tidak bias lagi diklaim semata-mata milik orang Maluku di dalam model interaksi tanpa batas seperti ini.”¹⁰

Contoh yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hibridasi budaya global tersebut adalah Ryan dan Doc, dua orang musisi asal Amerika dan Belanda yang sebelumnya belum pernah menginjakkan kaki di Maluku bahkan berhubungan dengan orang Maluku, “secara mengejutkan bisa meramu ‘*rhythm music*’ Maluku dalam kemasan menarik, yakni ‘*Song for the Spirit of Maluku*’”¹¹ Selanjutnya terbukalah kemungkinan bagi Maluku untuk menawarkan berbagai kearifan lokal yang dimilikinya kepada kebudayaan dan peradapan global yang senantiasa berkembang.

Akhirnya, secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa seluruh proses evolutif masyarakat Maluku di atas kini tampak dalam kepelbagaian unsur budaya yang telah terkandung dalam budaya-budaya lokal di kalangan suku-suku asli Maluku. Kepelbagaian budaya tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari kepelbagaian suku yang kini hidup di wilayah Maluku. Kini di Maluku selain hidup orang-orang suku asli Maluku (Ambon, Seram, Buru, Kei, Tanimbar, Aru, Tepa, Kisar dan lain-lain, terdapat juga suku-suku lain baik yang sudah tinggal di Maluku sejak dahulu maupun yang baru dating abad-abad terakhir (China, Arab, Buton Bugis, Makassar, Flores, Jawa, Manado dan lain-lain. Berbagai suku-suku pendatang ini dapat ditemukan di 11 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh wilayah Maluku.

Fakta Historis Pluralitas Agama

Agama dan kebudayaan Hindu–Budha berkembang luas di Indonesia sejak lama. Pada tahun 400 M dipastikan agama Hindu dan Buddha sudah berkembang di sejumlah wilayah di Nusantara. Informasi tentang keberadaan agama Hindu-Budha di Maluku lebih kuat terkait dengan tradisi lisan tentang asal-usul nenek moyang masyarakat yang berasal dari Bali yang kala itu menerima pengaruh yang kuat dari kebudayaan/agama Hindu-Budha. Pada kenyataannya hingga kini sebagian masyarakat Maluku memeluk agama Hindu dan Buddha dan menjalankan praktek keagamaan mereka sebagaimana biasanya.¹²

Agama Islam masuk ke wilayah Maluku melalui para tokoh agama Islam (mubaliq) yang turut bersama para pedagang. Pada abad XV, agama Islam telah tumbuh dan berkembang di Maluku Utara dan di kemudian hari menyebar ke wilayah provinsi Maluku. Pada abad awal XVI (sekitar tahun 1500) agama Islam dibawa masuk ke Maluku Tengah oleh para pedagang Jawa Timur (Gresik) yang berpusat di pulau Ambon (Hitu). Pada abad yang sama, agama Islam pun menyebar ke bagian wilayah Maluku lain, yakni kepulauan Kei, melalui pengaruh dari Jawa, Ternate dan Hitu. Dari awal

¹⁰ Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, *Menelusuri Identitas Kemalukuan*, ix.

¹¹ Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, *Menelusuri Identitas Kemalukuan*.

¹² Marlon NR Ririmasse, “Maluku: Sebuah Citra Dalam Bingkai Sumber Daya Arkeologi,” *Kapata Arkeologi Edisi Khusus* (2007): 107, <https://media.neliti.com/media/publications/143790-ID-maluku-sebuah-citra-dalam-bingkai-sumber.pdf>.

inilah proses penyebaran berkembang menjadi sebuah gerakan yang oleh Bambang Suwondo sebagai *proses islamisasi*, yaitu usaha memasukkan nilai-nilai Islam ke berbagai segi kehidupan, termasuk budaya, hukum, dan sosial-politik. Hasilnya adalah Islam menjadi agama mayoritas di Maluku seperti yang kita lihat sekarang ini.¹³

Penyebaran agama Kristen ke Maluku beriringan dengan masuknya bangsa Eropa ke Maluku. Proses masuknya kekristenan ini, oleh Suwondo, dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap penyebaran oleh Portugis (Katolik) dan tahap penyebaran oleh Belanda (Protestan).¹⁴ Kehadiran bangsa Portugis di Maluku pada abad XVI, selain untuk misi perdagangan, juga disertai dengan misi penyebaran iman Kristen Katolik. Dalam masa ini, tahun 1534, telah terjadi pembaptisan pertama di Maluku Utara (desa Mamuia).

Selanjutnya, sekitar tahun 1558 dicatat bahwa di Ambon dan pulau-pulau sekitarnya telah dibaptis sekitar 50.000 orang berkat usaha para imam serta awam saat itu, di antaranya Fransiskus Xaverius. Misi Katolik ini mulai dihancurkan dengan kehadiran bangsa Belanda. Pengusiran Portugis oleh Belanda pada tahun 1605 mengakhiri eksistensi penyebaran iman Katolik pada masa ini.¹⁵

Namun setelah dua abad berlalu muncullah harapan baru bagi misi Katolik, yang ditandai dengan pengiriman 2 misionaris SJ di pulau Kei pada tahun 1888 oleh Vikaris Apostolik di Batavia. Kemudian, sejak pembaptisan pertama di Langgur-Kei tahun 1889, iman Katolik yang sempat hilang kembali berkembang di Maluku hingga saat ini sebagaimana yang kita saksikan sendiri.¹⁶

Kehadiran Belanda di Maluku merupakan awal dari penyebaran agama Protestan di daerah ini. Orang Belanda datang dengan tujuan utama untuk berdagang. Namun dengan berlakunya semboyan ‘barang siapa mempunyai wilayah, di situ berlaku pula agamanya pada zaman itu’, maka dengan sendirinya Belanda terlibat dalam misi penyebaran agama Protestan di Maluku. Agama Katolik yang telah ditanamkan oleh Portugis lalu diganti dengan agama Protestan. Suwondo menulis,

Atas dasar wewenang yang diterima dari Pemerintah Belanda, maka V.O.C. sebagai penguasa agama Protestan menuntut penganut-penganut agama Katolik supaya berpindah ke agama Protestan. Setelah penyerahan Ambon kepada Belanda oleh Portugis, maka para paderi mendapat izi dari van der Haghen untuk tetap melakukan tugas mereka. Tetapi kemudian penggantinya yaitu Fredrik de Houtman mengusir semua paderi Portugis.

¹³ B. Suwondo, *Sejarah Daerah Maluku*, eds. S. Kutoyo & S. Katradarmadja, (Jakarta: Proyek Pengembangan Media dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 59.

¹⁴ Suwondo, *Sejarah Daerah Maluku*.

¹⁵ P.G.H. Schreurs, *Lanjutan Karya St. Fransiskus Xaverius: Kebangkitan Kembali Misi Katolik di Maluku 1886-1950*, ed. C. J. Bohm, (Ambon: Pusat Pastoral Keuskupan Amboina, 1992), 3-5.

¹⁶ P. Renyaan, *Seratus Tahun Perkembangan Agama Katolik Di Kepulauan Kei 1889-1989* (Ambon: Pusat Pastoral Keuskupan Amboina, 1996), 7-19.

Dengan tindakan ini, maka semua orang Katolik sekaligus telah menjadi Protestan.¹⁷

Selanjutnya agama Protestan pun semakin hari semakin berkembang di daerah-daerah lain di Maluku (Seram, Haruku, Tanimbar, Kei dan lain-lain), dan kini menjadi agama mayoritas ke dua di Maluku.

Wajah Pluralitas Budaya dan Agama di Maluku

Secara historis, pemaparan latar belakang di atas memberikan gambaran umum tentang evolusi dari pluralitas kehidupan masyarakat Maluku yang hadir di masa kini. Secara geografis, Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di bagian Utara, Provinsi Papua Barat di bagian Timur, Negara Timor Leste dan Negara Australia di bagian Selatan, serta Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di bagian Barat. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau. Sejak tahun 2008, Provinsi Maluku terdiri atas 9 Kabupaten dan 2 Kota dengan Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku.

Maluku, yang merupakan provinsi kepulauan, sudah tentu, memiliki keragaman unsur budaya. Nilai-nilai budaya dapat ditemukan pada falsafah “Pela-Gandong”, “Siwalima”, “Ain Ni Ain”, “Kidabela”, “Kalwedo” dan lainnya. Dari aspek bahasa, terdapat 117 jenis bahasa lokal yang masih aktif dipergunakan dari 152 rumpun bahasa Austronesia yang pernah ada. Dari segi pola hidup masyarakat tradisional, terdapat suku-suku yang masih asli seperti Naulu di Pulau Buru, Alifuru di Pulau Seram, dan lain-lain.¹⁸

Sementara budaya-budaya lokal di Maluku dapat dikategorikan menurut suku-suku yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Orang Ambon, Orang Seram, Orang Buru, Orang Kei, Orang Tanimbar, Orang Aru, Orang Tapa-Kisar dan lain-lain. Masing-masing suku tersebut mendiami pulau/gugusan pulau yang berbeda-beda. Selain suku-suku asli Maluku ini masih juga terdapat berbagai suku lain seperti Tionghoa, Buton, Bugis, Makassar, Flores, Jawa, Manado dan lain-lain. Hadirnya suku-suku luar Maluku ini merupakan sebuah konsekuensi dari kedudukan Maluku sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala migrasi penduduk yang sangat dinamis, baik secara spontan maupun terprogram.

Selain terdiri dari berbagai suku, ras dan budaya, di Maluku juga terdapat berbagai agama dan kepercayaan. Menurut data kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku tahun 2019, penduduk Maluku memeluk agama Islam, Kristen

¹⁷ Suwondo, *Sejarah Daerah Maluku*, 61.

¹⁸ Solemede et al., “Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata Budaya di Provinsi Maluku: Suatu Kajian Analisis di Masa Transisi Ke Normal Baru,” *NOUMENA: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2020): 79, <https://core.ac.uk/download/pdf/327096855.pdf>.

Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.¹⁹ Dari data Kementerian Agama Provinsi Maluku tentang presentase pemeluk agama menurut Kabupaten/Kota di Maluku tahun 2019, diperoleh pula angka persentase pemeluk agama di Maluku sebagai berikut: Islam (53,03%), Kristen Protestan (35,28%), Kristen Katolik (10,77%), Hindu (0,80%) dan Budha (0,09%). Agama-agama ini tersebar di seluruh wilayah Maluku dengan konsentrasi jumlah yang bervariasi.²⁰

Iklim kehidupan yang pluralistis merupakan latar belakang dari pembahasan tentang moderasi beragama. Tanpa konteks kehidupan yang plural tema moderasi beragama akan menjadi suatu pembahasan tanpa relevansi. Problem-problem riil yang ditemui dalam kehidupan yang bersifat plural melahirkan kebutuhan akan langkah-langkah penanganan tertentu. Dibutuhkan komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang utuh, di mana setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus rela untuk saling mendengarkan. Moderasi beragama lalu menjadi sebuah pilihan strategis yang sedang diperjuangkan sekarang di Indonesia, dan bersifat berkelanjutan mengikuti perkembangan sosial manusia setempat. Upaya untuk mewujudkan komitmen bersama melalui moderasi beragama tentunya diwarnai dengan faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat.

Afirmasi Terhadap Moderasi Beragama

Keberagaman budaya dan agama di Maluku dipandang sebagai sebuah kekayaan dan modal bagi pembangunan Maluku. Segi positif ini dapat dipandang dari perspektif moderasi beragama sambil menyoroti secara khusus sejauh mana moderasi tersebut terafirmasi dalam pluralitas kehidupan masyarakat Maluku. Dari sekian banyak indikator, segaja dipilih dua indikator utama yang menjadi pijakan dalam usaha membangun moderasi beragama, yakni: *nilai-nilai budaya* dan *peran agama*.

Peran Nilai-Nilai Budaya Maluku Sebagai Pemersatu

Terdapat falsafah-falsafah hidup Maluku berupa: “Pela-Gandong”, “Siwalima”, “Ain Ni Ain”, “Kidabela”, “Kalwedo” dan lainnya. Di sini hanya akan dikemukakan beberapa dari antaranya sebagai sampel untuk menjelaskan afirmasi budaya (adat) terhadap usaha membangun moderasi beragama yang pernah terjadi di wilayah Maluku.

Falsafah *Pela-Gandong* merupakan sebuah tradisi sosiokultural dalam kehidupan orang Maluku, khususnya di Ambon, Seram dan Lease. Pela diartikan sebagai suatu relasi perjanjian persaudaraan antara satu negeri dengan negeri/desa lain, di pulau lain, dan yang tidak mengenal perbedaan agama. Sedangkan gandong memiliki makna “adik”. Perjanjian ini dilaksanakan dengan disertai sumpah adat yang tidak boleh dilanggar dan tentunya disertai dengan sangsi-sangsi tertentu terkait dengan

¹⁹ Urutan agama-agama ini disusun berturut-turut menurut jumlah paling banyak hingga jumlah yang paling sedikit.

²⁰ Kementerian Agama Provinsi Maluku, *Presentase Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (2019)*, <https://kemenag.go.id/halaman/pemeluk-agama> (diakses May 29, 2022).

pelanggarannya.²¹ Hubungan Pela ini terjadi karena suatu peristiwa (kebutuhan bersama ataupun peperangan) yang melibatkan dua atau bahkan beberapa desa. Dalam ikatan Pela terdapat rangkaian nilai dan aturan mengikat dalam persekutuan persaudaraan atau kekeluargaan.²²

Ikatan Pela-Gandong yang telah ditetapkan oleh leluhur ini pada intinya mengarahkan masyarakat untuk saling menolong dalam berbagai aktivitas, saling mendukung untuk mencapai sesuatu yang dimanfaatkan secara bersama dan mengambil keputusan dengan cara musyawarah.²³ Oleh karena itu ikatan kekerabatan ini sering dipandang sebagai falsafah budaya yang mampu mbingkai praktek kehidupan masyarakat dalam hal persatuan (sila ke-3 Pancasila), kerukunan dalam kehidupan antar agama (toleransi) dan menghindari sedapat mungkin munculnya perkelahian/peperangan yang berkepanjangan dalam kehidupan bermasyarakat (kekerasan). Kini falsafah budaya ini sering terungkap dalam percakapan melalui istilah-istilah populer seperti *orang basudara, ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di danging, sagu selempeng dipatah dua*.

Selain Pela-Gandong, *Ain Ni Ain* adalah sebuah falsafah hidup sosial kemasyarakatan orang Kei yang sejak dahulu kala memiliki latarbelakang kehidupan yang berkelompok-kelompok. *Ain Ni Ain* adalah ungkapan populer yang merupakan penggalan awal dari sebuah frase *ain ni ain – ain teran ain – ain ni rawai ain* (saling memiliki – menjadi bagian dari yang lain – saling membutuhkan). Ungkapan ini mengandung pesan bahwa tidak seorangpun dapat hidup tanpa campur tangan orang lain. Manusia memiliki kelebihan dan keunikannya sendiri, namun ia juga memiliki keterbatasan yang tidak dapat diatasi sendiri. Falsafah ini mendasari kehidupan bermasyarakat orang Kei di manapun mereka berada. Dari pandangan dasar hidup inilah lahir berbagai tradisi dan perjanjian persaudaraan, termasuk *Tea-Bel* yang telah disebut di atas.²⁴

Berbagai hubungan yang dibangun dengan pihak lain, entah di kalangan internal orang Kei maupun dengan kalangan eksternal lintas pulau dilaksanakan tanpa membedakan suku dan agama. Sebuah contoh historis²⁵ yang dapat dikemukakan di sini

²¹ Sebuah contoh proses perjanjian Pela: Pada saat upacara sumpah, campuran soppi (tuak) dan darah dari tubuh masing-masing pemimpin negeri akan di minum oleh kedua pemimpin setelah senjata dan alat-alat tajam lain di celupkan, atau dilakukan dengan memakan sirih pinang.

²² A.S. Rahayu, *Mengenal Tradisi Pela Gandong Sebagai Bingkai Persatuan*, 2021, June 22, <https://kabardamai.id/mengenal-tradisi-pela-gandong-sebagai-bingkai-persatuan> (diakses 24 Mei 2024).

²³ J.E. de Frates, "Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Pasca-Konflik Tahun 1999 Dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah," *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19, no. 1 (2013): 21-22, <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/6766/5304>.

²⁴ E. Silubun, *Larvuhul Ngabal: Menyingkap Kembali Hukum Adat Kei*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: InsistPress, 2020), 227-233.

²⁵ Contoh ini dikemukakan tanpa bermaksud menegaskan bahwa sebab konflik Ambon. Contoh ini dikemukakan dengan tujuan menjelaskan bahwa falsafah Ain Ni Ain turut berperan dalam penyelesaian konflik.

adalah pengalaman tentang tidak padamnya semangat *Ain Ni Ain* dalam hidup warga kota Ambon asal Kei Ketika berlangsungnya peristiwa konflik sosial 1999-2002 di Ambon. Dalam kehidupan harian yang penuh ketegangan serta peta kota Ambon yang terpisah-pisah antara golongan Islam dan Kristen (Katolik dan Protestan), komunikasi antara masyarakat Kei, baik yang beragama Islam maupun Kristen, tetap berlangsung secara intensif. Komunikasi ini terwujud baik lewat media komunikasi (telepon, handy talky dan lain-lain) maupun pertemuan-pertemuan tertutup di kawasan perbatasan wilayah-wilayah hunian Islam dan Kristen.

Pertemuan-pertemuan tertutup tersebut, selain menjaga persaudaraan dalam semangat *Ain Ni Ain*, juga menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam usaha penyelesaian konflik. Berdasarkan pengalaman pribadi penulis, sebuah langkah yang hampir mustahil pada saat itu pun ditempuh, yakni tokoh-tokoh Kei (Islam, Katolik dan Protestan) memfasilitasi para penumpang non-Islam yang hendak bepergian ke luar Kota Ambon dengan menumpang kapal laut di pelabuhan yang terletak di kawasan hunian warga yang beragama Islam. Tentunya terdapat pula contoh-contoh lain namun tidak perlu dikemukakan di sini.

Terlepas dari apa yang menjadi penyebab konflik horizontal Maluku 1999-2002 itu, patutlah diakui bahwa situasi konflik ini turut diwarnai oleh sentimen agama yang melahirkan radikalisme di kalangan agama Islam maupun Kristen. Dalam konteks seperti ini, langkah-langkah moderat yang lahir dari semangat budaya sebagaimana dikemukakan di atas merupakan sebuah bentuk moderasi yang berorientasi pada toleransi dan anti kekerasan serta, lebih luas lagi, berdampak pada persatuan anak-anak bangs ini.

Implementasi semangat budaya *Ain Ni Ain* yang ini tidak hanya berhenti pada situasi konflik Maluku melainkan masih berlangsung terus hingga saat ini dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Fakta yang bisa dikemukakan di antaranya urusan adat perkawinan, adat kematian, kunungan silaturahmi-hari raya keagamaan maupun kegiatan-kegiatan bakti sosial kemanusiaan di berbagai tempat di Maluku, bahkan di berbagai wilayah di luar Maluku.

Peran Agama-Agama Sebagai Faktor Pemersatu

Walaupun warga Maluku terdiri dari para pemeluk agama yang berbeda-beda, dan tetap diakui sebagai realitas yang mengandung potensi perpecahan, namun kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa masing-masing agama, dengan kandungan nilai-nilai luhur spiritualnya, telah turut berperan dalam membangun moderasi beragama di Maluku. Dua faktor yang sengaja dikemukakan di sini adalah peran para tokoh agama dan kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang di Maluku.

Konflik horizontal Maluku yang berlangsung kurang lebih sejak Januari 1999 hingga tahun 2002 dipandang sebagai ujian berat bagi semangat cinta damai sesuai nilai-

nilai budaya yang dialihwariskan sejak para leluhur. Konflik ini terwujud dalam bentuk penghancuran simbol-simbol keagamaan, seperti tempat-tempat ibadat, dan penganiayaan umat beragama minoritas di berbagai tempat oleh kelompok agama mayoritas. Selain itu, di tempat-tempat yang berimbang jumlahnya antara penganut agama Islam dan Kristen terjadi saling menyerang antara kedua kelompok.

Dalam situasi yang sedemikian mencekam, para tokoh agama Maluku (Ketua MUI, Ketua Sinode, dan Uskup Diosis) senantiasa berusaha tetap netral dalam himbuan dan pernyataan-pernyataan publik mereka, sambil terus meyakinkan masyarakat bahwa konflik Maluku bukanlah konflik agama yang rekayasa oleh warga masyarakat Maluku sendiri melainkan bersumber dari luar Maluku dengan motif kekuasaan dan politik.

Semuel Waileruny dalam bukunya yang berjudul “Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku” mengutip pernyataan-pernyataan para tokoh kunci agama Islam, Protestan, dan Katolik yang berusaha memberikan pernyataan publik yang sifatnya moderat dan mencerahkan publik yang semakin terbawa isu-isu seputar perang antar Islam dan Kristen. Mengutip pendapat Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Waileruny menulis:

Agama bukan sebagai penyebab utama konflik tetapi hal ini sebagai konflik politik, kemudian mengeksploitasi atau memobilisasi agama sebagai energi. Agama sebagai energi yang paling ampuh untuk membakar.²⁶

Dikutip pula pernyataan seorang mantan Ketua Sinode yang berbunyi:

Konflik Maluku bukan konflik agama tetapi dilakukan oleh pusat lalu menjadikan agama sebagai alat. *Seng mungkin katong sendiri bisa biking kerusuhan itu, baik racangan maupun pelaksanaannya.*²⁷

Waileruny juga mengutip pandangan Ketua MUI Maluku yang berbunyi:

Elit-elit politik di Jakarta yang melakukan konflik, mulai dari Ketapang ke Kupang, ke berbagai tempat kemudian ke Maluku. Konflik yang dilakukan di Maluku dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan anak negeri Maluku di Maluku karena memiliki pemahaman sempit menyangkut agama yang dianutnya.²⁸

Menurut Waileruni, Uskup Diosis Ambaina saat itu, Mgr P.C. Managi MSC, pun memiliki pandangan yang senada, secara khusus ditinjau dari sisi keterlibatan aparat TNI/Polri:

²⁶ S. Waileruny, *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*, Edisi Kedua, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 161.

²⁷ Waileruny, *Membongkar Konspirasi*, 161.

²⁸ Waileruny, *Membongkar Konspirasi*, 159.

Dengan banyaknya kesalahan yang dibuat oleh banyak kesatuan pada berbagai tempat di mana TNI/Polri sangat ketat dengan sistem komando, saya menganggapnya sebagai kesalahan pribadi, yakni pribadi yang memegang komando, yaitu pribadi yang memimpin institusi itu, dia adalah tokoh sentral... dan pasti dia berada dalam jajaran pemerintahan, dia ada di dalam jajaran yang berkuasa.²⁹

Pada kesempatan lain, Mgr. Mandagi, sebagai pimpinan umat Katolik, mengatakan:

Secara institusional, saya sebagai uskup selalu menekankan bahwa orang Katolik tidak boleh terlibat dalam kerusuhan. Dalam arti tidak ikut menyerang, membakar, membunuh dan sebagainya, karena ini bertentangan dengan iman kristiani. Tetapi mereka juga adalah manusia lemah. Mereka ada di tengah-tengah masyarakat. Mereka kadang-kadang ikut, tetapi dalam arti terlebih untuk membela diri. Membela diri adalah hak hidup.³⁰

Dari kutipan-kutipan wawancara di atas, tampaklah bagi kita bagaimana para pemimpin agama Maluku berusaha untuk mengklarifikasi kepada masyarakat Maluku bahwa agama tidak pernah mengajarkan kekerasan. Gagasan yang ada di balik itu adalah perlunya membangun toleransi sebagai senjata untuk meredakan konflik dan kekerasan yang dirancang dari luar Maluku.

Terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh negara yang telah sering dilaksanakan di Maluku yakni Msabaqah Tilawail Quran (MTQ) untuk kalangan Islam, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) untuk kalangan Protestan dan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) untuk kalangan Katolik. Di Maluku, kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut telah dilaksanakan di berbagai level, mulai dari level kabupaten/kota, provinsi hingga level nasional.

Menarik bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut, baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional, yang terlibat untuk mensukseskannya bukan hanya golongan umat seagama yang terkait kegiatan itu, melainkan masyarakat yang melampaui batas-batas agama. Indikator-indikator keterlibatan lintas agama dimaksud terdiri dari: keanggotaan panitia penyelenggara, peserta pendukung seremoni pembukaan dan penutupan, serta anggota masyarakat yang bersedia menyediakan rumah mereka sebagai tempat menginap bagi para kontingen yang datang dari luar daerah tempat penyelenggaraan.

Baiklah dikemukakan penyelenggaraan Pesparani Katolik Nasional I 2018 di Ambon, Provinsi Maluku. Selama kegiatan nasional ini, sangat tampak jelas keterlibatan semua golongan agama di Kota Ambon. Dalam konteks ini, Zeth Sahubarua

²⁹ Waileruny, *Membongkar Konspirasi*, 161.

³⁰ P.C. Mandagi, *Buah-Buah Iman Dalam Praksis Pastoral. Sebuah Dialog Teologal Di Ranah Sosial Politik*, Edisi Keenam, ed. F. H. Pangemanan, (Jakarta: Penerbit Hati Baru, 2014), 130.

(Wakil Gubernur yang bertugas sebagai Ketua Panitia, yang juga non-Katolik) memandang acara Pesparani sebagai momen penting untuk mewartakan persatuan dan integrasi bangsa Indonesia yang sangat majemuk, termasuk agama. Menurutnya: “Sebagai acara agama Katolik, Pesparani harus memberikan kontribusi mewartakan persaudaraan dan persatuan. Agama harus menjaga harmonisasi dan kekuatan integrasi demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”³¹ Selain Pesparani Katolik, pelaksanaan MTQ ke 29 tingkat Provinsi Maluku 2022 di Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pun disoroti media sebagai kegiatan yang diwarnai dengan kebhinekaan. Bahkan panitia kegiatan MTQ tersebut juga diketuai bukan oleh seorang yang beragama Islam melainkan seorang Pastor Katolik.³²

Afirmasi terhadap moderasi beragama di Maluku secara jelas tampak baik dari segi nilai-nilai budaya maupun dari segi peran agama-agama di Maluku. Fakta bahwa hingga kini nilai-nilai budaya dan kehadiran agama-agama di Maluku telah menampakkan perannya sebagai alat pemersatu di Maluku dan turut mendukung usaha moderasi beragama dalam hal: anti kekerasan, toleransi beragama, dan kesatuan bangsa.

Negasi Terhadap Moderasi Beragama

Selain faktor-faktor yang meneguhkan moderasi beragama, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula faktor-faktor yang menghambat moderasi beragama. Latar belakang historis, baik budaya maupun agama, yang telah dikemukakan secara garis besar pada bagian awal tulisan ini memberikan signal bahwa sejak dahulu telah terjadi ketegangan-ketegangan yang kemudian terkristal dalam bentuk gesekan-gesekan sosial dalam kehidupan manusia di Maluku. Gejala masa silam tersebut bukanlah rangkaian peristiwa-peristiwa yang telah terkubur oleh masa lalu tanpa hubungan apapun dengan masa kini. Sebaliknya gesekan-gesekan masa lalu itu senantiasa memiliki pengaruh tertentu hingga masa kini.

Lingkup Budaya

Sejak lama, sebagaimana dicatat oleh Suwondo, di Maluku sudah terdapat kelompok-kelompok masyarakat kecil (*kampung/ohoi*) yang terbentuk berdasarkan faktor geneologis dan territorial serta ekonomi menjamin adanya kedamaian. Kendati demikian jika ada hal yang bertentangan dengan kepentingan kelompok (misalnya pelanggaran adat), maka akan terjadi pertikaian yang kemudian diikuti dengan usaha perdamaian yang ditandai dengan janji untuk tidak ada konflik lagi antara kedua pihak yang bertikai (*perjanjian pela/tea-bel*). Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok

³¹ Berita Satu.com. *Wagub Maluku: Agama Harus Jadi Kekuatan Integritas Bangsa*, 28 October 2018, <https://beritasatu.com/archive/518999/wagub-maluku-agama-harus-jadi-kekuatan-integrasi-bangsa> (diakses 24 Mei 2024).

³² Investor Daily, *Kebhinekaan Warnai MTQ Ke-29 Provinsi Maluku*, 25 March 2022, 25).<https://investor.id/nasional/288255/kebhinekaan-warnai-mtq-ke29-provinsi-maluku> (diakses 24 Mei 2024).

masyarakat yang relatif kecil tersebut mengalami perkembangan hingga melampaui batas-batas geneologis dan territorial menuju hubungan-hubungan perdagangan.

Perkembangan ini pun membawa resiko persaingan bahkan peperangan antar kelompok yang lebih besar (Uli, Kerajaan, Ratskap dan lain-lain). Persaingan dalam perdagangan dan pelayaran ini, lebih lanjut menggiring kepada penggabungan diri dengan perserikatan-perserikatan politis yang lebih besar lagi (Pata Siwa – Pata Lima, Ur Siu – Lor Lim) dengan orientasi peperangan. Iklim konflik yang sudah ada sejak lama ini semakin diperumit lagi ketika bangsa-bangsa asing (Eropa) mulai campur tangan dalam percaturan politik di wilayah Maluku.³³

Selain itu, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, posisi kebudayaan Maluku dalam pusaran kebudayaan nasional melahirkan pula potensi konflik tersendiri. Politik monokultural (yang ditandai dengan dominasi budaya Jawa) yang diterapkan oleh Pemerintah Orde Baru selama puluhan tahun mengakibatkan degradasi nilai-nilai budaya lokal, yang menurut para ahli berimbas sampai pada konflik sosial tahun 1999-2002 di Maluku.³⁴ Mengutip kata-kata Raja Amahusu (kepala Latupati (Kepala Raja-Raja di wilayah Maluku Tengah), De Fretes menulis:

dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 telah mengubah status negeri-negeri adat menjadi desa sehingga berakibat semua pranata adat di dalamnya juga berubah. Perubahan itu adalah Saniri Negeri menjadi LMD dan LKMD dan Soa menjadi RT/ RW. Kondisi ini menyebabkan tatanan adat istiadat di Maluku dapat dikatakan punah.³⁵

Dari segi peraturan perundang-undangan, hal seperti ini berlaku secara resmi hingga tahun 2004 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kendati demikian, efek degradasi nilai-nilai budaya yang telah terjadi sebelumnya berdampak hingga sekarang.

Posisi Maluku dalam geliat hibridasi budaya global masih menunjukkan dampak terkait dengan degradasi nilai-nilai budaya, baik lokal maupun nasional. Telah dikatakan bahwa dalam kondisi yang sedemikian, efektifitas narasi-narasi besar kebudayaan (misalnya Pancasila, dan Wawasan Nusantara) menjadi semakin melemah khususnya dalam usaha pembentukan karakter masyarakat. Di sini pun terjadi pelemahan ketahanan diri orang-orang Maluku sebagai warga negara Indonesia.

Haruslah diakui pula bahwa sejak dahulu, potensi konflik sudah ada sebagaimana tampak dalam sejarah Maluku. Hal itu lebih terakumulasi lagi dengan degradasi nilai-nilai budaya sebagaimana digambarkan dalam proses asimilasi budaya Maluku di atas. Pada gilirannya degradasi nilai budaya tersebut berpotensi memperlemah daya tahan

³³ Suwondo, *Sejarah Daerah Maluku*, 50-51.

³⁴ Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, *Menelusuri Identitas Kemalukuan*, vii.

³⁵ de Frates, "Pembinaan Kerukunan," 21.

masyarakat Maluku yang plural, sehingga dengan lebih gampang anggota masyarakat terprovokasi bahkan turut serta dalam kelompok-kelompok ekstrimis konflik Maluku yang dikenal dengan sebutan *laskar jihad* (kelompok Islam) dan *RMS* (kelompok Kristen).

Lingkup Agama

Kehadiran bangsa Portugis di daerah Maluku dengan tujuan selain berdagang juga menyebarkan agama Katolik. Tentang itu Suwondo menulis:

Kehadiran mereka di Maluku tepat dan bersamaan dengan adanya ketegangan-ketegangan politik dalam usaha perebutan hegemoni dan supremasi kekuasaan di daerah ini, antara kerajaan-kerajaan di Maluku, antara raja-raja Islam yang telah lebih dahulu menguasai beberapa daerah. Di tengah-tengah ketegangan politik itu, Portugis turut melibatkan diri. Hal ini mengakibatkan pula pemberitaan Injil dan pembentukan Gereja Kristen (Katolik) terlibat pula dalam ketegangan-ketegangan itu.³⁶

Ini berarti dengan berbagai alasan, termasuk alasan sosial-politik, telah terjadi konflik antara penganut agama Katolik yang baru tiba di Maluku dengan penganut Islam yang telah lebih dahulu tersebar di Maluku.

Penyebaran agama Protestan oleh Belanda pun tidak luput dari konflik dan persaingan politik global.³⁷ Kisah tentang larangan berkaya bagi para imam Katolik di Maluku, pemaksaan umat Katolik agar berpindah keyakinan menjadi Protestan, mengungkapkan secara jelas bagaimana terjadinya persaingan bahkan konflik antara agama Katolik dan Protestan yang sama sekali tidak bebas dari persaingan politis pada masa itu.

Tak dapat disangkal bahwa sejarah masa lalu masih membekas hingga saat ini. Hal ini menyebabkan adanya sentimen-sentimen atau kecurigaan-kecurigaan tertentu baik secara personal maupun secara kolektif, yang pada takaran tertentu, menghambat kerja sama antar agama atau toleransi yang kini telah gencar diusahakan (dan menghasilkan kemajuan yang signifikan dibanding 30 tahun yang lalu). Gejala ini sangat jarang diungkapkan secara publik tapi lebih riil dialami. Kendati demikian, sentimen-sentimen semacam itu secara kebetulan tampak dalam hasil wawancara yang dilakukan Waileruny sehubungan dengan penelusuran akar konflik Maluku.³⁸

Negasi terhadap moderasi beragama di Maluku masih menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat Maluku. Baik dari sisi budaya maupun peran agama-agama di Maluku masih menampakkan faktor pengingkaran terhadap moderasi beragama. Dari sekian banyak fenomena yang ada, faktor degradasi nilai-nilai

³⁶ Suwondo, *Sejarah Daerah Maluku*, 60.

³⁷ Bdk. Schreurs, *Lanjutan Karya St. Fransiskus Xaverius*, 2-5.

³⁸ Waileruny, *Membongkar Konspirasi*, 151-156.

kehidupan menempati posisi sentral dan strategis. Lemahnya nilai-nilai budaya dan agama, baik yang diakibatkan oleh sistem maupun kecenderungan pribadi dan kelompok, membuka peluang yang besar bagi rapuhnya sumber daya manusia. Kerapuhan yang tampak pada lemahnya daya tahan diri ini membuka peluang bagi tumbuhnya radikalisme agama, primordialisme budaya yang sempit, serta gampang terjerumus dalam penyakit-penyakit sosial seperti kemabukan, perkelahian, begal, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Pluralitas budaya dan agama merupakan fakta yang tak terbantahkan dalam kehidupan masyarakat di Maluku. Dinamika pergumulannya munculkan dua fenomena yang berbeda: di satu pihak tumbuh afirmasi terhadap cita-cita moderasi beragama, sementara di lain pihak terdapat pula negasi. Kenyataan bahwa hingga kini di Maluku masih hidup komitmen kebangsaan, toleransi dan sikap anti kekerasan menunjukkan bahwa masyarakat Maluku masih mempunyai modal yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas moderasi beragama. Sedangkan masih adanya kerapuhan bahkan rongrongan terhadap komitmen kebangsaan, toleransi dan sikap anti kekerasan merupakan fakta yang berbicara tentang adanya kebutuhan untuk terus berbenah diri, mengingat moderasi beragama mengandaikan sebuah usaha yang berkesinambungan.

Baik fakta afirmasi maupun negasi sama-sama berbicara tentang kebutuhan akan adanya persahabatan. Dalam konteks pembahasan ini, persahabatan perlu dibangun melalui komitmen berbangsa, toleransi dan anti kekerasan. Hal mendasar yang perlu dalam usaha meningkatkan komitmen berbangsa, toleransi dan anti kekerasan tidak lain adalah pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya dan agama yang berkesinambungan dalam kehidupan orang-orang di Maluku.

Bagi pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya dan agama ini, diusulkan beberapa hal konkrit yang kiranya perlu diusahakan di Maluku. Pertama, penguatan pendidikan kearifan lokal yang diajarkan melalui muatan lokal pada sekolah-sekolah di Maluku. Kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan-kegiatan seni-budaya di masing-masing kabupaten/kota di Maluku. Ketiga, peningkatan orientasi pembentukan karakter melalui mata pelajaran/kuliah Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah di Maluku. Keempat, peningkatan orientasi terhadap pertumbuhan kualitas iman dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, baik di kalangan internal agama-agama maupun di lingkungan masyarakat umum di Maluku. Untuk semuanya itu dibutuhkan kerja sama yang efektif dari *tiga tungku* (tiga pilar) masyarakat Maluku, yakni lembaga-lembaga agama, adat, dan pemerintah. "Persahabatan itu amat perlu dalam setiap keadaan hidup manusia siapapun dan kapan saja,"³⁹ oleh karena itu perlu diperjuangkan kesuburannya.

³⁹ A. Riyanto, *Dialog Interreligius: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*, Edisi Kelima, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), 48.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. *Proyeksi Penduduk Maluku Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) 2018-2020*. <https://maluku.bps.go.id/indicator/12/307/1/proyeksi-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses May 31, 2022.
- Berita Satu.com. *Wagub Maluku: Agama Harus Jadi Kekuatan Integritas Bangsa*. 28 October 2018. <https://beritasatu.com/archive/518999/wagub-maluku-agama-harus-jadi-kekuatan-integrasi-bangsa>. Diakses 24 Mei 2024.
- de Frates, J.E. “Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Pasca-Konflik Tahun 1999 Dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 19, No. 1 (2013): 21-22. <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/6766/5304>.
- DPMPTSP Maluku. “Gambaran Umum Maluku.” Accessed June 3, 2022. <https://dpmptsp/maluku.com/provinsi-maluku/gambaran-umum>.
- Investor Daily, *Kebhinekaan Warnai MTQ Ke-29 Provinsi Maluku*. 25 March 2022. <https://investor.id/nasional/288255/kebhinekaan-warnai-mtq-ke29-provinsi-maluku>. Diakses 24 Mei 2024.
- Kementerian Agama Provinsi Maluku. *Presentase Pemeluk Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (2019)*. <https://kemenag.go.id/halaman/pemeluk-agama>. Diakses May 29, 2022.
- Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku. *Menelusuri Identitas Kemalukuan*. Edisi Ketiga. Editor Tim Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku dan Rosa Delima. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2019.
- Mandagi, P.C. *Buah-Buah Iman Dalam Praksis Pastoral. Sebuah Dialog Teologal Di Ranah Sosial Politik*. 6th Edition. Editor F. H. Pangemanan. Jakarta: Penerbit Hati Baru, 2014.
- Rahawarin, Bernard A., F. Selatang, & Ignasius S.S. Refo. “Kontekstualisasi Teologis Sakramen Tobat dalam Tradisi Sob Lor pada Masyarakat Kei Provinsi Maluku.” *SMART. Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 7, No. 1, (2021): 115–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.18784/smart.v7i01.1246>.
- Rahayu, A. S. *Mengenal Tradisi Pela Gandong Sebagai Bingkai Persatuan*. 22 June 2021. <https://kabardamai.id/mengenal-tradisi-pela-gandong-sebagai-bingkai-persatuan>. Diakses 24 Mei 2024.
- Renyaan, P. *Seratus Tahun Perkembangan Agama Katolik Di Kepulauan Kei 1889-1989*. Ambon: Pusat Pastoral Keuskupan Amboina, 1996.
- Riyanto, A. *Dialog Interreligi: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Schreurs, P.G.H. *Lanjutan Karya St. Fransiskus Xaverius: Kebangkitan Kembali Misi Katolik di Maluku 1886-1950*. Editor C. J. Bohm. Ambon: Pusat Pastoral Keuskupan Amboina, 1992.
- Silubun, E. *Larvhul Ngabal: Menyingkap Kembali Hukum Adat Kei*. Edisi Pertama. Yogyakarta: InsistPress, 2020.
- Solemede, I., T. Tamaneha, R. Selfanay, M. Solemede, M., & K. Walunaman. “Strategi Pemulihan Potensi Pariwisata Budaya di Provinsi Maluku: Suatu Kajian Analisis

- di Masa Transisi Ke Normal Baru.” *NOUMENA: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan* 1, No. 1 (2020): 69–86. <https://core.ac.uk/download/pdf/327096855.pdf>.
- Suwondo, B. *Sejarah Daerah Maluku*. Editor S. Kutoyo & S. Katradarmadja. akarta: Proyek Pengembangan Media dan Kebudayaan Depatremen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Tim Kementerian Agama. *Moderasi Beragama*. Edition Pertama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Waileruny, S. *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*. Edisi Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.